

Judul : KPK harus panggil Menpora klarifikasi LHKPN
Tanggal : Jumat, 21 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

KPK Harus Panggil Menpora Klarifikasi LHKPN

Menpora Dito menyatakan siap memenuhi panggilan KPK untuk memberikan klarifikasi perihal LHKPN yang dilaporkannya pada 12 Juli 2023.

YAKUB PRYATAMA WIJAYAATMAJA
yakup@mediaindonesia.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo untuk mengklarifikasi laporannya terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dalam laporan itu, Dito mencatatkan aset hadiah sebesar Rp162 miliar.

"Memanggil Dito untuk dimintai keterangan soal LHKPN merupakan satu langkah tepat KPK. Kan bisa membuat terang apakah ada dugaan pidana yang dilakukan terkait harta yang diperoleh atau tidak," terang peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman ketika dihubungi, kemarin.

"Dan itu juga akan menjadi *fair* untuk Dito. Jika memang ada perolehan dari pidana, silakan diproses hukum. Kalau tidak, Dito juga bisa memulihkan nama baiknya," imbuhnya.

Intinya, kata Zaenur, sudah seharusnya Dito buat klarifikasi mengenai LHKPN miliknya agar dapat menjerihkan masalah. Di lain pihak, KPK juga perlu aktif untuk meneliti apakah laporan harta yang disampaikan Dito

benar atau tidak.

"Selain itu, KPK bisa meneliti apakah perolehannya dari perolehan yang sah, seperti yang disampaikan Menteri Dito adalah pemberian dari mertua kepada istri Dito, semua perlu didalami," tuturnya.

Seperti diberitakan, KPK tengah mempertimbangkan memanggil Menpora Dito untuk mengklarifikasi LHKPN yang dilaporkannya.

"Saya diskusikan dulu dengan tim, ya," kata Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui keterangan tertulis, kemarin.

Total kekayaan Dito diketahui mencapai Rp282,26 miliar. Dalam data yang dikirimkannya tercatat ada hadiah berupa empat rumah dan satu mobil senilai Rp162 miliar.

Pahala menjelaskan kepemilikan aset berupa hadiah itu sah dimasukkan ke LHKPN. Sebab, kata dia, KPK tidak mewajibkan penyertaan dokumen dalam pengisian.

"Kan di isiananya nomor sertifikat dan lain lain, tapi enggak perlu dilampirkan (bukti pendukung) waktu lapor," ujar Pahala.

Menurutnya, pendalaman aset bisa dilakukan dengan klarifikasi kepada pejabat terkait. Jika dipanggil, Dito bakal diminta memberikan bukti

pendukung.

Siap klarifikasi

Menpora Dito Ariotedjo menyatakan siap memenuhi panggilan KPK untuk memberikan klarifikasi terkait LHKPN yang dilaporkannya pada 12 Juli 2023.

"Ya (siap) kan memang klarifikasi jika diperlukan, dan proses KPK memang resmi 30 hari untuk sanggahan dan verifikasi," ucap Dito saat di hubungi, kemarin.

Dito menjelaskan bahwa sebagian harta miliaran rupiah yang dimilikinya itu merupakan hadiah pemberian dari mertuanya. Setidaknya ada empat aset rumah dan satu mobil yang tercatat sebagai hadiah. Nilainya sekitar Rp162 miliar. "Hadiah empat aset rumah dan mobil itu merupakan pemberian orangtua istri saya ke istri," terang Dito.

Istri Dito, Nienna Kirana Riskyana, merupakan putri Fuad Hasan Masyhur, pendiri dan pemilik Maktour Grup yang salah satu usahanya bergerak pada jasa *travel* umrah dan haji.

Selain itu, Fuad juga merupakan pemilik PT Menthoi Karyatama Raya Tbk yang bergerak di bidang industri kelapa sawit dan mempunyai area perkebunan serta pabrik kelapa sawit di Kalimantan Tengah. (Can/Rif/X 5)